

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan tata kelola yang terarah diperlukan adanya perubahan sistem paradigma pemerintahan dari yang sistem lama ke sistem baru. Peralihan dari asas sentralisasi menuju asas desentralisasi menghasilkan konsep otonomi daerah. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut dilaksakan oleh pemda dan DPRD menganut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. (UU No. 23 Tahun 2014).

Kunci keberhasilan sistem otonomi daerah berdasarkan dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Pasal 1, PP No.12 Tahun 2019).

Akuntabilitas keuangan daerah bukan sekedar kemampuan kepala daerah untuk menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan, namun hal ini mencakup kemampuan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut mencapai hasil yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai sasaran atau tujuan guna kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada taraf harga yang paling rendah atau murah (Mardiasmo, 2016:32).

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan karena ketidakmerataan pembangunan yang menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Campur tangan pemerintah pusat juga menjadi alasan terhambatnya kreativitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing. Otonomi daerah dapat membuka jalan yang luas bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerahnya secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan agar dapat mendorong perekonomian daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah yang baik pula.

Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang memiliki sektor perekonomian yang cukup banyak dan terus berkembang dengan maraknya pembangunan-pembangunan yang sudah maupun sedang dilaksanakan. Serta cukup banyaknya potensi atau sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD)

dari sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, dan pariwisata yang merupakan sumber utama dari APBD di Kabupaten Pati.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengalokasikan keuangan daerah terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Berikut adalah gambaran pendapatan daerah yang merupakan sumber utama APBD di Kabupaten Pati Tahun 2015-2019:

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pati

Periode 2015-2019

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Pencapaian %
2015	Rp. 2.139.777.675.000	Rp. 2.181.691.961.101	101,96
2016	Rp. 2.465.177.234.000	Rp. 2.445.063.689.933	99,18
2017	Rp. 2.712.776.398.000	Rp. 2.769.242.943.472	102,08
2018	Rp. 2.775.318.641.000	Rp. 2.789.055.859.845	100,49
2019	Rp. 2.856.879.730.000	Rp. 2.838.881.396.181	99,37

Sumber: <https://bpkad.patikab.go.id/>, diolah (2021).

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran daerah periode 2015-2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. Pada tahun 2015, 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa angka realisasi pendapatan daerah lebih besar daripada angka yang sudah ditargetkan dalam anggaran, artinya pada tahun tersebut pemerintah daerah Kabupaten Pati dapat memenuhi target yang telah dianggarkan dengan presentase pencapaian

sebesar (101,96%); (102,08%); dan (100,49%). Sedangkan pada tahun 2016 dan 2019, menunjukkan angka realisasi pendapatan daerah lebih kecil daripada angka target anggaran, artinya pemerintah daerah Kabupaten Pati pada tahun tersebut tidak dapat memenuhi target yang telah dianggarkan yaitu dengan presentase pencapaian sebesar (99,18%) dan (99,37%).



Sumber : Data yang sudah diolah (2021).

Gambar 1.1

Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015-2019.

Berdasarkan data presentase realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pati tahun 2015-2019 dapat dikatakan fluktuatif. Dimana hal tersebut terlihat adanya kenaikan atau penurunan angka realisasi pendapatan daerah yang tidak stabil. Meskipun begitu penurunan persentase realisasi pendapatan daerah tersebut tidak jauh dari nilai anggaran yang telah ditentukan. Serta dengan adanya peningkatan presentase realisasi pendapatan daerah, akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Pati.

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan

otonomi daerah. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah dapat dianalisis berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. (Halim dan Kusufi, 2016:230).

Penggunaan analisis rasio keuangan pada organisasi sektor publik, khususnya Pemerintah daerah belum banyak dilakukan, tidak seperti untuk sektor privat yang sudah banyak dilakukan penelitiannya. Hal tersebut dikarenakan (Pramono, 2014:87):

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi Pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi yang bersifat privat misalnya perusahaan.
2. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD.

Penelitian terdahulu oleh Dewi (2018) melakukan analisis kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah dimana dalam menilai kinerja keuangan tersebut menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 berada pada tingkat kemandirian

sedang. Pada tingkat efektivitas kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang sudah sangat efektif. Dilihat dari rasio pertumbuhan kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang cukup fluktuatif.

Fathah (2017) dalam penelitiannya untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul menggunakan analisis rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio keserasian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Gunung Kidul jika dilihat dari rasio efektivitas PAD tergolong efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 131,8%. Dari hasil analisis rasio efisiensi keuangan daerah belum efisien karena selama lima tahun berturut-turut skalanya di atas 100%. Jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif. Serta dilihat dari rasio keserasian masih banyak mengalokasikan belanja operasi daripada belanja modalnya.

Ropa (2016) dalam penelitiannya yaitu analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Memberikan gambaran hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, dilihat dari rasio efisiensi menunjukkan hasil kurang efisien, dalam rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik (pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan) namun kurang baik dalam (pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan).

Penelitian diatas menunjukkan perbedaan hasil penelitian pada masing-masing daerah, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali tema ini dan menguji kembali mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati melalui rasio-rasio keuangan daerah. Sebagai penduduk asli Kabupaten Pati serta kemudahan dalam mendapatkan data guna penelitian, maka dari itu peneliti mengambil objek pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengukur kinerja keuangan daerah Kabupaten Pati secara rinci. BPKAD merupakan badan yang mengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Pati. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN DAERAH PADA BPKAD (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH) KABUPATEN PATI PERIODE 2015-2019.**

1.2. Ruang Lingkup

Agar dalam pembahasan penelitian lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka berdasarkan dengan judul yang diambil penulis menentukan ruang lingkup atau batasan penelitian diantaranya adalah :

1. Objek penelitian pada Badan Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang mengeluarkan laporan realisasi anggaran dengan kurun waktu 5 tahun berturut-turut periode tahun 2015-2019.

2. Penelitian ini membahas tentang penilaian tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
3. Penilaian tingkat kinerja keuangan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian.
4. Penelitian ini diselesaikan dalam kurun waktu 2 bulan setelah rancangan penelitian disetujui terhitung mulai 30 April 2021 sampai dengan 30 Juli 2021.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang menjadi sumber referensi oleh penulis, penggunaan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil penilaian tingkat kinerja keuangan yang berbeda-beda pada masing-masing daerah. Serta dengan adanya fenomena bisnis yang telah dijabarkan pada bagian latar belakang, yang mana nilai presentasi pencapaian realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Pati mengalami peningkatan yang kurang stabil (*fluktuatif*) dari tahun ke tahun. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibentuklah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati periode 2015-2019 ditinjau dari analisis rasio kemandirian keuangan daerah?
2. Bagaimana tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati periode 2015-2019 ditinjau dari rasio efektifitas PAD?

3. Bagaimana tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati periode 2015-2019 ditinjau dari rasio efisiensi keuangan daerah?
4. Bagaimana tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati periode 2015-2019 ditinjau dari rasio keserasian?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati periode 2015-2019 ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati periode 2015-2019 ditinjau dari rasio efektivitas PAD.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati periode 2015-2019 ditinjau dari rasio efisiensi keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pati periode 2015-2019 ditinjau dari rasio keserasian.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penilaian tingkat kinerja keuangan Kabupaten Pati periode 2015-2019 yang ditinjau dari teori rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Pemerintah Daerah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau sumbang pemikiran kepada pemerintah daerah didalam menganalisis kinerja keuangannya guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam mendorong kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik.

b. Bagi Almamater.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengembangan ilmu manajemen keuangan di lingkungan Universitas Muria Kudus dan dapat menjadi bahan referensi atau acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

c. Bagi Peneliti.

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan penerapan teori analisis keuangan daerah dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio keserasian guna menilai tingkat kinerja keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Pati.